



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 2 C TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN

PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Pekalongan perlu diberikan Bantuan Penghargaan dan Perlindungan Tahun 2017 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
  - b. bahwa agar pemberian Bantuan Penghargaan dan Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar maka perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur pelaksanaannya melalui Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pemberian Bantuan Penghargaan dan Perlindungan Tahun 2017 ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TAHUN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kemenag, adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
7. Bantuan Penghargaan dan Perlindungan Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Bantuan Harlindung adalah dana yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan di wilayah Kota Pekalongan sebagai penghargaan atas kinerjanya yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan Tahun 2017.
8. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Tenaga Honorer Kategori 2 adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pernah mengikuti seleksi CPNS Pemerintah Kota Pekalongan formasi tenaga honorer tahun 2014 dan dinyatakan tidak lolos seleksi CPNS.
11. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Harlindung oleh Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan penghargaan atas kinerja dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

### Pasal 3

Pemberian Bantuan Harlindung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

### BAB III

#### SASARAN

### Pasal 4

Bantuan Harlindung diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kemenag yang memenuhi persyaratan.

### BAB IV

#### PENGELOLA, SUMBER, DAN BESARAN DANA

### Pasal 5

Bantuan Harlindung dikelola oleh Dinas Pendidikan.

### Pasal 6

Bantuan Harlindung bersumber dari APBD Kota Pekalongan Tahun 2017.

### Pasal 7

- (1) Besaran Bantuan Harlindung tiap penerima disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan yaitu:
  - a. paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan per orang bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga Honorer Kategori 2;
  - b. paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Tenaga Honorer Kategori 2.
- (2) Bantuan Harlindung diberikan:
  - a. penuh sesuai besaran maksimal yang telah ditentukan; atau
  - b. tidak penuh bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menerima bantuan lain sejenis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Besaran Bantuan Harlindung yang diterima diperhitungkan dengan ketentuan pajak yang berlaku.

## BAB V

### MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HARLINDUNG

#### Bagian Kesatu Tahap Persiapan

##### Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan membentuk Tim Pengelola pelaksanaan pemberian Bantuan Harlindung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Tim Pengelola melaksanakan proses Verifikasi dan Validasi sebagai berikut:
  - a. menghimpun seluruh data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan dokumen dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  - c. melakukan perubahan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan jika ditemukan data yang tidak sesuai sebagaimana hasil verifikasi dan validasi.

#### Bagian Kedua Tatacara Penyaluran

##### Pasal 9

- (1) Tim Pengelola melaksanakan proses pencairan sebagai berikut:
  - a. menyusun daftar seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah diverifikasi dan validasi berdasarkan peringkat masa kerja;
  - b. menyusun daftar calon penerima bantuan Harlindung;
  - c. memproses penerbitan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penerima Bantuan Harlindung; dan
  - d. memproses pencairan Bantuan Harlindung.
- (2) Penyaluran Bantuan Harlindung dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Bank yang ditunjuk sebagai penyalur Bantuan Harlindung adalah Bank Jateng Cabang Kota Pekalongan.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Harlindung dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan.
- (2) Monitoring dan evaluasi bersifat pembinaan dan menitikberatkan pada aspek-aspek:
  - a. ketepatan anggaran, sasaran, dan waktu;
  - b. mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban;
  - c. dampak dan manfaat bantuan; dan
  - d. permasalahan yang timbul dan upaya pemecahan permasalahan.

- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Tim Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

## BAB VII

### ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

Administrasi pertanggungjawaban pengelolaan Bantuan Harlindung meliputi:

- a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan penerima dan besaran bantuan Harlindung Tahun 2017;
- b. tanda terima Bantuan Harlindung dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. bukti pencairan Bantuan Harlindung; dan
- d. bukti setor pajak.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 12

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. memberikan data dan informasi data yang benar;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan data.

#### Bagian Kedua Sanksi

#### Pasal 13

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai penerima bantuan Harlindung dan mengembalikan bantuan yang telah diterima sebagian atau seluruhnya untuk disetorkan kembali ke Kas daerah.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Harlindung diatur dalam petunjuk teknis dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 19 Januari 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.		Ka. Dinas	
2.	Ag	Septuwin	γ
3.		10/11/17	
4.	Umay.s	Kasi PR&MP	Q

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	Uj
2.	ASISTEN I	6
3.	KABAG HUKUM	9
4.	KASUBAG	